

Pemberontakan DI/TII

Sekarmadji maridjan kartosoewirjo demikian nama lengkapnya. Ia dilahirkan pada tanggal 7 januari 1907 di cepu, sebuah kota kecil antara blora dan bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan antara jawa timur dan jawa tengah. Berbeda dengan tokoh agama yang lainnya ia tak mempunyai latar belakang agama. Pendidikan formalnya memang dihabiskan dalam sistem pendidikan belanda. Kartosuwiryo beruntung pekerjaan orang tuannya yang sebagai pegawai candu, membuat ia disekolahkan di pendidikan belanda. Interaksi dengan sang paman yang bernama marko kartodikromo, menumbuhkan kesadaran politik kartosuwiryo.

Pada tahun 1925 kartosuwiryo ikut organisasi pemuda islam JIB (jong islamienten bond) di jawa. diorganisasi inilah ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh islam seperti agus salim dan oemar said tjokroaminoto menawari kartosuwiryo menjadi sekertaris pribadinnya. Saat kartosuwiryo aktif di PSI ia mulai aktif mempelajari bahasa islam, namun karena belum fasih terhadap bahasa islam ia mulai belajar buku-buku islam yang berbahasa belanda. Selain itu juga pada tahun 1930 ia sempat menimba ilmu agama kepada beberapa ulama di garut yang juga para aktivis PSI, yaitu kyai ardiwisastera, yang kelak menjadimertuannya. Kesemua gurunya adalah ulama tradisional, bukan ulama modernis, atau penganut ajaran salafy.

Interaksi dengan tjokroaminoto, keterlibatannya dengan PSI, dan pelajaran agama dari guru-gurunya di garut inilah yang membangun pemahaman keislaman kartosuwiryo. Ia terinspirasi gagasan negara islam yang diperjuangkan oleh PSI dan berusaha memperjuangkannya⁴. PSI memang sebuah partai yang “menuntut akan berlakunya syari’at islam, di dalam arti kata yang seluas-luas dan sesempurna-sesempurnanya, menurut contoh dan teladan yang nyata di dalam sunnah rasulullah. PSI sendiri tak sekedar berniat mendirikan negara islam indonesia, tapi juga menganut paham pan-islamisme. pan-islamisme adalah gagasan untuk menyatukan seluruh umat diseluruh dunia dalam satu kekhalifahan. Awalnya PSI cukup serius dalam memperjuangkan ide ini, namun setelah kejatuhan khalifah turki Usmani pada 1924, PSI ikut membentuk komite khalifah, semacam komite untuk memperjuangkan kembali khalifah, dan tokoh PSI wondoamiseno sebagai ketuannya. Belakangan bersama dengan meningkatnya pemahaman agama kartosuwiryo tentang pentingnya umat islam mendirikan sebuah negara islam dimana masyarakat dapat melaksanakan syari’at islam, baik syari’at islam yang bersifat pribadi maupun sosial. Ia juga yakin negara islam yang ia sebut darul islam bisa menaikkan harkat dan martabat bangsa.

Dalam sejarah indonesia modern, bisa dikatakan kartosuwiryo lah yang pertama kali menggunakan istilah dan menyamakan dengan negara islam. Menurut mohammad natsir pada tahun 1930an belum dikenal istilah tersebut. Negara islam selalu disebut dengan istilah negara berdasarkan islam. Keterlibatan kartosuwiryo dalam PSI juga membangun watak anti kompromi pada dirinya. Saat karto suwiryo bergabung dengan syarikat islam, PSI sedang bersemangat menerapkan politik nonkooperasi terhadap pemerintah kolonial belanda. Nonkooperasi artinya tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial dalam hal pemerintahan, maupun semacam dewan rakyat seperti volksraad yang dibentuk pemerintah belanda termasuk menolak bantuan dari pemerintah belanda. Penerapan politik nonkooperasi menjadi salah satu pecahnya hubungan antara muhammadiyah dengan PSI, hal ini disebabkan karena Muhammadiyah menerima bantuan pemerintah kolonial belanda⁵.

Selepas dikeluarkan dari PSI pada 1939, kartosuwiryo pindah ke malangbong garut. bersama kyai jusuf taujiri dan kamran, ia mendirikan komite pertahanan kebenaran PSII. Komite ini menggunakan anggaran dasar dan peraturan PSII dan menganggap dirinya sebagai

sarekat islam yang sebenarnya. Pada tahun 1940, ia membentuk lembaga pengkaderan yang disebut institut suffah. Kelak, sebagian alumni institut suffah ini menjadi pengikut setia Kartosuwiryo saat mendirikan gerakan Darul Islam. Pengkaderan di institut suffah berhenti karena dibubarkan oleh Jepang yang pada saat itu sedang datang ke Indonesia pada 1942. Pendudukan Jepang di Indonesia selain membuat kesengsaraan juga membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di institut suffah. Namun kali ini berbeda bukan pembentukan kader-kader partai tapi kader-kader militer. Pada 1945 ia segera mengaktifkan kembali lembaga suffah untuk mengembleng para pemuda yang bergabung dengan Hizbullah, para pemuda di persenjatai dan digembleng militer.

Secara resmi DI/TII sudah berdiri sejak Mei 1948, namun baru di proklamasikan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Cisampak, Kecamatan Cilugagar, Kabupaten Tasikmalaya. Bunyi proklamasinya, “kami umat Islam Indonesia menyatakan berdiri negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berkuasa atas negara Islam Indonesia adalah hukum Islam.” Dalam penjelasan teks proklamasi yang terdiri dari 10 butir itu disebutkan antara lain, negara Islam Indonesia merupakan negara Islam dimasa perang atau Darul Islam fi waqitil harb. Sementara hukum yang berlaku adalah hukum Islam⁶. Hukum Islam yang diterapkan oleh DI/TII bisa dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana negara Islam Indonesia (UUHPNII). Untuk melaksanakan UUHPNII ini, Darul Islam telah membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah yaitu: daerah I (D.I), daerah II (D II) dan daerah III (D III). Namun pembagian Darul Islam dan Darul Harb ini menjadi masalah ketika diterapkan di wilayah di Indonesia. Pasalnya mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, Darul Harb sendiri merujuk kepada wilayah yang ditempati orang-orang kafir harby (yang boleh diperangi).

DI/TII di Berbagai Daerah

1. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada tanggal 7 Agustus 1949 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo secara resmi menyatakan bahwa organisasi Negara Islam Indonesia (NII) berdiri berlandaskan kanun azasi, dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali antara pasukan TNI dengan pasukan DI/TII. Memasuki 1950an pemberontakan DI/TII yang berpusat di Jawa Barat mendapat sambutan di beberapa daerah. Semisal kasus di daerah Sulawesi yang disebabkan bukan karena masalah agama tetapi karena masalah kesenjangan sosial yang dilakukan oleh pemerintah karena hanya dilakukan di pusat saja⁷.

2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Selain di Jawa Barat, pasukan DI/TII ini juga muncul di Jawa Tengah semenjak adanya Majelis Islam yang dipimpin oleh seseorang bernama Amir Fatah. Amir Fatah adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946, menggabungkan diri dengan pasukan TNI Battalion 52, dan bertempat tinggal di Berebes, Tegal. Amir ini mempunyai pengikut yang jumlahnya cukup banyak, dan cara Amir mendapatkan para pasukan tersebut, yaitu. Dengan cara menggabungkan para laskar untuk masuk ke dalam anggota TNI. Setelah Amir Fatah mendapatkan pengikut yang banyak, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 ia memproklamasikan bahwa organisasi Darul Islam (DI) berdiri di desa pesangrahan, Tegal. Dan setelah proklamasi tersebut dilaksanakan, Amir Fatah pun menyatakan bahwa gerakan DI yang

di pimpinnya bergabung dengan organisasi DI/TII Jawa Barat yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Di Kebumen juga terdapat sebuah organisasi bernama Angkatan Umat Islam (AUI) yang di dirikan oleh seorang kyai bernama Mohammad Mahfud Abdurrahman. Organisasi tersebut juga bermaksud untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII) dan bersekutu dengan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Sebenarnya, gerakan ini sudah di desak oleh pasukan TNI. Akan tetapi, pada tahun 1952, organisasi ini bangkit kembali dan menjadi lebih kuat setelah terjadinya pemberontakan Battalion 423 dan 426 di Magelang dan Kudus. Upaya untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan baru yang di beri nama Banteng Raiders dengan organisasinya yang di sebut Gerakan Banteng Negara (GBN). Pada tahun 1954 di lakukan sebuah operasi yang di sebut Operasi Guntur untuk menghancurkan kelompok DI/TII tersebut⁸.

3. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada bulan Oktober 1950 terjadi sebuah pemberontakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) yang di pimpin oleh seorang mantan letnan dua TNI bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompok KRyT menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi DI/TII yang berada di Jawa Barat. Sasaran utama yang di serang oleh kelompok ini adalah pos-pos TNI yang berada di wilayah tersebut. Setelah pemerintah memberi kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik, akhirnya seorang mantan letnan Ibnu Hajar menyerahkan diri. Akan tetapi, penyerahan dirinya tersebut hanyalah sebuah topeng untuk merampas peralatan TNI, dan setelah peralatan tersebut di rampas olehnya, maka Ibnu Hajar pun melarikan diri dan kembali bersekutu dengan kelompok DI/TII. Setelah itu, akhirnya pemerintahan RI mengadakan Gerakan Operasi Militer (GOM) yang di kirim ke Kalimantan selatan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan tersebut, dan pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil di ringkus dan di jatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965.

Tokoh tokoh lokal itu bergabung dengan DI/TII umumnya bukan karena masalah agama. Mereka memberontak kepada RI karena kecewa dengan kebijakan- kebijakanyang diambil oleh pemerintah jakarta terhadap daerah atau kelompok mereka. Dan mereka beranggapan bahwa islam bisa menjadi sebuah perekat bagi pemimpin pemberontakan.

4. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Sesaat setelah Kemerdekaan Republik Indonesia di proklamasikan, di Aceh (Serambi Mekah) terjadi sebuah konflik antara kelompok alim ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang di pimpin oleh Tengku Daud Beureuh dengan kepala adat (Uleebalang). Konflik tersebut mengakibatkan perang saudara antara kedua kelompok tersebut yang berlangsung sejak Desember 1945 sampai Februari 1946. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah RI memberikan status Daerah Istimewa tingkat provinsi kepada Aceh, dan mengangkat Tengku Daud Beureuh sebagai pemimpin/gubernur.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) yang terbentuk pada bulan Agustus 1950. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan sebuah sistem penyederhanaan administrasi pemerintahan yang mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan status. Salah satu dari semua daerah yang statusnya turun yaitu Aceh, yang tadinya menjabat sebagai Daerah Istimewa, setelah operasi penyederhanaan tersebut di mulai, status

Aceh pun berubah menjadi daerah keresidenan yang di kuasai oleh provinsi Sumatera Utara. Kejadian ini sangat mengecewakan seorang Daud Beureuh, dan akhirnya Daud Beureuh membuat sebuah keputusan yang bulat untuk bergabung dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 September 1953. Setelah Daud Beureuh bergabung dengan NII, mereka melakukan sebuah operasi untuk menguasai kota-kota yang berada di Aceh, selain itu mereka juga melakukan propaganda untuk memperkeruh citra pemerintahan Republik Indonesia. Kasus pemberontakan di Aceh ini menjadi perekat di antara para pemimpin yang memberontak.

5. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Selain pemberontakan DI/TII di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI/TII ini juga terjadi di Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kahar Muzakar, organisasi yang sudah di dirikan sejak tahun 1951 tersebut baru bisa di runtuhkan oleh pemerintah pada Tahun 1965. Untuk menumpas organisasi tersebut di butuhkan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena kondisi medan yang sangat sulit. Meski demikian, para pemberontak DI/TII sangat menguasai area tersebut. Selain itu, para pemberontak memanfaatkan rasa kesukuan yang berkembang di kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dalam menumpas organisasi DI/TII tersebut. Setelah pemerintahan Republik Indonesia mengadakan operasi penumpasan DI/TII bersama anggota Tentara Republik Indonesia. Barulah seorang Kahar Muzakar tertangkap dan di tembak oleh pasukan TNI pada tanggal 3 Februari 1965.

Pada akhirnya TNI mampu menghalau seluruh pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Karena seperti yang kita ketahui Indonesia terbentuk dari berbagai suku dengan beragam kebudayaannya dan UUD 45 yang melindungi beberapa kepercayaan sehingga tidak mungkin untuk menjadikan salah satu hukum agama di jadikan hukum negara. Hal ini disebabkan oleh kahar muzakar yang membangkang karena pasukannya yang tergabung dalam Kesatuan Gerilyawan Sulawesi selatan (KGSS) tidak mendapatkan tempat di APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia yang baru dibentuk).

Berakhirnya pemberontakan DI/TII

1) Penyelesaian Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada awalnya pemerintah RI berupaya menyelesaikan pemberontakan melalui jalan damai yaitu mengutus Moh. Natsri untuk mengajak Kartosuwiryo kembali kepangkuan ibu pertiwi, akan tetapi misi damai berujung kegagalan. Pada 4 juni 1962, perjalanan rombongan Kartosuwiryo telah samapi disebuah lembah antara gunung sangkar dan gunung geber, disekitar bandung selatan. Pasukan DI/TII berteduh di tenda darurat karena kondisi sedang hujan. Tak disangka terdengar suara bunyi tembakan dari bawah bukit. Pasukan yang berkekuatan tiga peleton itu telah mengepung rombongan kartosuwiryo. Kartosuwiryo dalam keadaan payah an berbaring dilantai gubuk itu dan mengenakan jaket militer dan sebuah saeung. Meskipun saat ia ditangkap dia berusia 55 tahun, tapi dia kelihatan seperti seorang lelaki tua yang lebih dari umurnya. Oleh karena itu operasi militer ditempuh oleh pemerintah. Operasi Bharatayudha dengan taktik Pagar Betis berhasil menangkap Kartosuwiryo di Gunung Geber, Majalaya Jawa Barat. Kartosuwiryo akhirnya dihukum mati pada tanggal 16 Agustus 1962.

2) Penyelesaian Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparat pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh “orang-orang Kiri”, dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh “orang-orang Kiri” tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo. Hingga kini Amir Fatah dinilai sebagai pembelot baik oleh negara RI maupun umat muslim Indonesia.

Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah ditumpas dengan Operasi Gerakan Banteng Negara (GBN) dipimpin oleh Letkol Sarbini (digantikan oleh Letkol M. Bachrun dan kemudian Ahmad Yani). GBN membentuk tentara khusus yang diberi nama Banteng Raiders. Sedangkan guna menumpas pemberontakan Batalyon 426 pemerintah membentuk Operasi Merdeka Timur yang dipimpin Letkol Soeharto. Pada awal tahun 1952 pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah berhasil dipadamkan.

3) Penyelesaian Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Ibnu Hajar adalah mantan anggota TNI yang memberontak dengan membentuk KRYT. Kemudian Ibnu Hajar menyatakan bergabung dengan NII pimpinan Kartosuwiryo. Penyelesaian pemberontakan Ibnu Hajar dilakukan dengan jalan damai dan operasi militer. Pada tahun 1963, pasukan Ibnu Hajar dapat ditumpas dan Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati.

4) Penyelesaian Pemberontakan DI/TII di Aceh

Dalam pertemuan dibahas pentingnya memperluas kerjasama gerakan terutama dengan bekas DI Sulawesi yang berganti namamenjadi Republik Persatuan Islam (RPI), serta bekas DI/TII Aceh. Aceng kurnia punya menantu orang DI Sulawesi. Selain itu juga ia mengenal gaos taufik, orang DI yang tinggal di medan yang merupakan orang kepercayaan tengku daud beureueh. Akhirnya disepakati bahwa aceng kurnia sendiri bertugas untuk bertemudaud beureueh¹⁴. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Beureuh mengeluarkan pernyataan bahwa Aceh termasuk bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Operasi militer dilakukan untuk menumpas pemberontakan DI/TII Aceh akan tetapi mengalami kegagalan. Atas prakarsa Kolonel M. Yasin, diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang berlangsung pada tanggal 17-21 Desember 1962. Akhir pemberontakan DI/TII Aceh diselesaikan dengan cara damai.

5) Penyelesaian Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah agar tentara KGSS dapat bergabung dengan APRIS. Pemerintah pusat menyalurkan tentara KGSS kedalam Korps Cadangan Nasional. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar beserta

anak buahnya melarikan diri ke hutan dan menyatakan bergabung dengan DI/TII Kartosuwiryo. Untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakar, pemerintah meluncurkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari Divisi Siliwangi. Pemberontakan Kahar Muzakar cukup sulit untuk ditumpas, mengingat pasukan Kahar Muzakar sangat mengenal medan pertempuran. Akhirnya pada bulan februari 1965 Kahar Muzakar tewas dalam sebuah pertempuran. Pemberontakan benar-benar dapat ditumpas pada Juli 1965.

Selain itu pada awal 1973, terjadi pertempuran antara Dodo Muhammad Darda dengan utusan republik persatuan islam (RPI) di Jakarta. Pertemuan dilakukan di rumah Menatu Aceng Kurniawan di daerah Kalibaru, Tanjung Priok. Tokoh RPI itu yang bernama Ali Achmad Tholib yang akrab disapa Ali A.T bahwa Sulawesi masih ada kekuatan bersenjata yang belum turun gunung. Mereka berada dibawah pimpinan Sanusi Daris, bekas menteri pertahanan PRRI. Pasukan ini masih aktif melakukan gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung di Sulawesi selatan. Dalam pertemuan itu kaso Ganidhan Sanusi Daris, yang ditugaskan untuk menghubungi orang-orang DI di Jawa Barat. Dalam dialog tersebut disepakati kerjasama antara RPI Sulawesi dengan tokoh-tokoh DI Jawa Barat dengan prinsip terselenggaranya syariat Islam di Indonesia.